

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2017 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2017, sehingga laporan kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun selama tahun 2017. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya, sehingga program di tahun

mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien dan terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

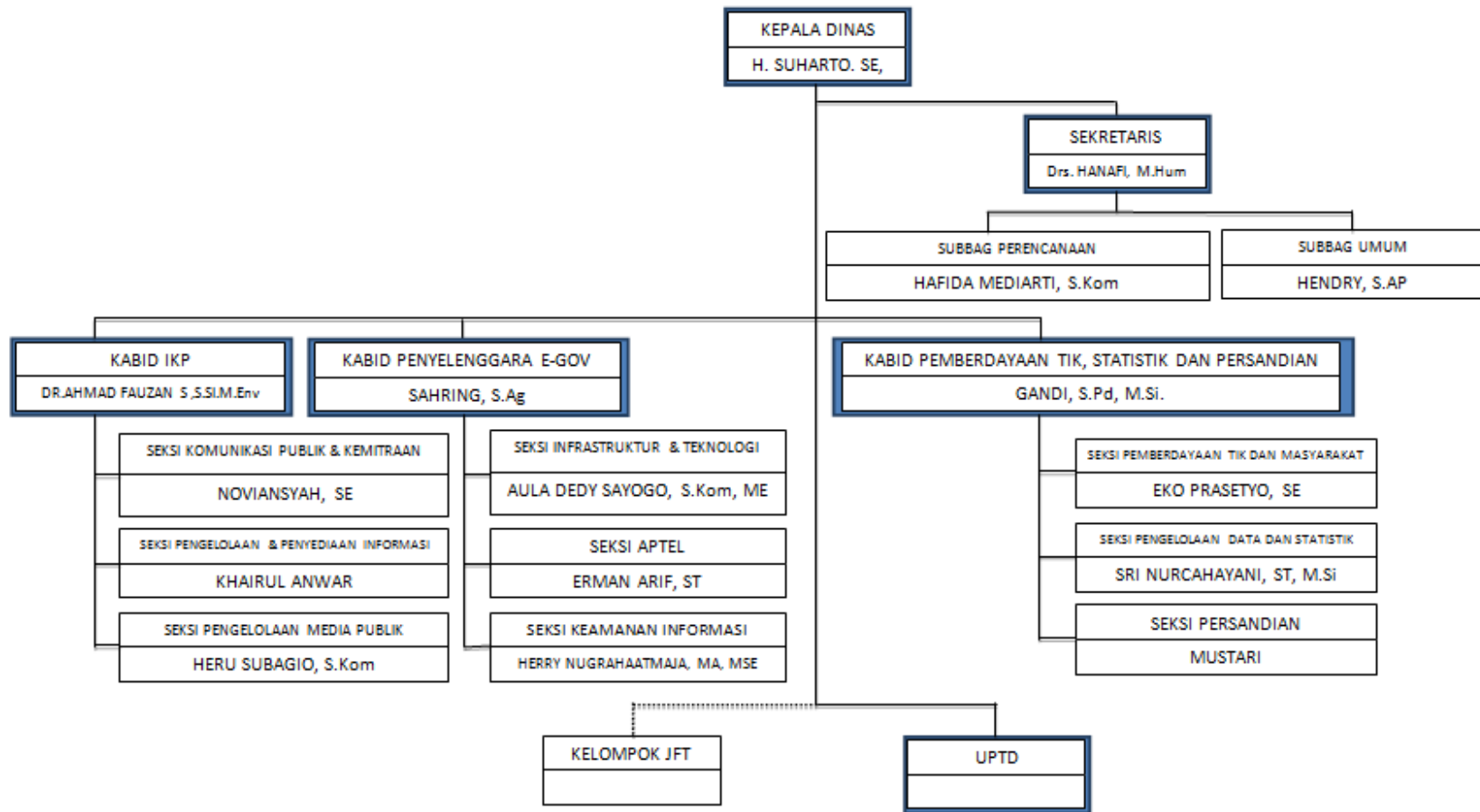
Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



## **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Penyelenggaraan dan pengordinasian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD);
6. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

## **SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, bidang statistik, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
2. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan Pembinaan dan promosi pegawai;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan;

### a. SUBBAG PERENCANAAN

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

### b. SUBBAG UMUM

Tugas : Melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.



## **BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Tugas : Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

### a. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan, perumusan kebijakan teknis komunikasi publik dan kemitraan.

### b. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis.

### c. Seksi Pengelolaan Media Publik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media publik.

## **BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**

Tugas : memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang e-Government.

### a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.

b. Seksi Aplikasi Telematika

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis aplikasi telematika.

c. Seksi Keamanan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi.

**BIDANG PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK,**

**PERSANDIAN**

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.

a. Seksi Pemberdayaan TIK dan Masyarakat

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan TIK dan masyarakat.

b. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik.

## **1.5 Aspek Strategis**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu

1. Terwujudnya saran dan prasarana teknologi informasi yang terintegritas dengan Kabupaten/ Kota;
2. Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi informasi dan komunikasi
3. Terwujudnya masyarakat yang berwawaasan teknologi informasi.  
Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK

## **1.6 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2017 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kualifikasi Pendidikan Pegawai S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 15 orang, SMU sebanyak 3 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel di bawah ini:

**Klasifikasi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	2	-	2
2	Pasca Sarjana/ S2	5	1	6
3	Sarjana / S1	13	9	22
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	7	8	15
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	2	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>48</b>

**Klasifikasi PNS  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Eseloning**

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	4		4
3	IV	9	2	11
4	JFU	13	7	20
5	JFT	3	9	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Review terhadap penetapan kinerja 2017 harus disesuaikan dengan rencana strategis 2012-2017. Dalam rencana strategis (Renstra) atau dalam penetapan kinerja 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi;
3. Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi.

Dalam penetapan kinerja tahun 2017 telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan perangkat daerah yang melaksanakan e-Government	100%
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam	Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dibidang	125 aparatur bidang komunikasi dan

	bidang komunikasi dan informasi	komunikasi dan informasi	informasi; 25 KIM, 70 PAK Pranata Humas, 266 aparatur fungsional komputer
3.	Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	Terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	5 media cetak, 3 media elektronik



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir periode instansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

**3.1.**

**Pengukuran Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase SKPD yang melaksanakan e-government	100%	85,06%	85,06%
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi	125 aparatur bidang komunikasi dan informasi, 25 KIM, 70 PAK pranata humas, 266 aparatur fungsional computer	73,74%	73,74%

3.	Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	Terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	5 media cetak dan 3 media online	98,59%	98,59%
----	---	--	----------------------------------	--------	--------

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mengukur meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator persentase peningkatan perangkat daerah yang melaksanakan e-Government.

**Tabel 3.2.**

**Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan perangkat daerah yang melaksanakan e-Government	100%	85,06%	85,06%

Dari tabel 3.2. di atas dapat dilihat bahwa realisasi SKPD yang melaksanakan e- government belum mencapai target dikarenakan belum meratanya sarana dan prasarana untuk akses pelayanan informasi publik di wilayah Bangka Belitung sehingga penyebaran informasi publik tidak merata.

**Sasaran Strategis 2 :** Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi.

Untuk mengukur meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dibidang komunikasi dan informasi

**Tabel 3.3**  
**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi	100%	73,74%	73,74%

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat bahwa belum optimalnya tingkat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi belum mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran yang berimplikasi pada pencapaian target yang tidak maksimal.

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi

Untuk menguku meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan indikator terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi

**Tabel 3.4**  
**Meningkatnya Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Infomasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%	94,11%	94,11%

Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa belum optimalnya Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi dikarenakan belum meratanya sarana dan prasarana untuk akses pelayanan informasi publik di wilayah Bangka Belitung sehingga penyebaran informasi public tidak merata dan adanya rasionalisasi anggaran yang berimplikasi pada pencapaian target yang tidak maksimal.

## B. Realisasi Anggaran

Di bawah ini realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase SKPD yang melaksanakan e-government	100%	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot	215.710.000	194.817.335	90,31
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa <i>Mobile Community Acces Point (M-CAP)</i>	145.088.000	111.399.202	76,78
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengelolaan dan operasional Media Center Prov Kep BABEL	169.220.000	126.915.864	75,00
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio	496.945.000	471.809.027	94,94
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	94.050.000	84.154.740	89,48

			Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi JARKOMSANDA Prov kep BAbel			
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi Penguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD	346.870.000	304.275.728	87,72
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Prov Kep Babel melalui TVRI BABEL	498.058.800	490.270.552	98,44
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Peningkatan Fungsi Pelayanan KID Prov kep Babel	580.730.000	556.551.273	95,84
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media Massa Seleksi Anggota KID Prov Kep Babel	84.600.000	84.279.962	99,62
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengadaan dan pengembangan Perangkat Lunak	504.720.000	477.068.595	94,52

			Aplikasi dasar Umum Pemerintah			
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pembangunan dan Pengembangan Portal Prov Kep BABEL	81.500.000	70.211.000	86,15
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengelolaan DRC	214.930.000	197.110.960	91,71
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Peningkatan Fungsi Pelayanan KPID Prov Kep Babel	718.750.000	704.341.427	98,00
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Implementasi Aplikasi Smart Citizen	402.185.000	0	0
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi	100%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang komunikasi dan kehumasan	0	0	0
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM	51.225.000	49.123.540	95,90

			Aparatur Pemerintah Bidang pengelolaan TIK			
			Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Pemberdayaan KIM	0	0	0
			Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	59.570.000	30.298.504	50,86
			Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Jabatan Penilaian Jabatan Pranata Humas	8.664.845	8.664.845	100
Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	Terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	183.050.000	181.885.757	99,36
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik	697.215.155	686.000.295	98,39



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2017. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kominfo Tahun 2017 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2016, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun – tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang melaksanakan e-government, pada tahun 2017 tercapai 85,06 %
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi dengan indikator kinerja Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi, tercapai dengan 73,74%.
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi” dengan indikator kinerja Terlaksananya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi tercapai dengan 94,11%.

Agar peran Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi, melalui media secara on line dengan dukungan TIK.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode mendatang.

